Pelajaran Geografi pada Kurikulum Berbasis Kompetensi

Mochamad Enoh

Abstract: The alteration of curriculum with competence basis as a tool to reach national education objectives, can not deny but this alteration should not ignore the science concept itself, like what happen in geographic, because it will remove the essence of geographic science itself. The merger of geographic lesson to Physic lesson and Economic lesson for curriculum of SMU (Senior High School) make vague the unity of geographic as science branch that have unified characteristic. In the draft of curriculum with competence basis 2001, structurally the geographic lesson were not explicit, the label not exist but the substances exist. It will make any restless in the environment of teachers, lecturers and the college students who will become geographic teachers, beside that they also feel set aside by "the policy makers" in center of curriculum which direct or indirect result victims. In the alteration of curriculum with competence basis, the geographic lesson related with another lesson, not impossible in the curriculum alteration of next basic and intermediate education, the geographic lesson will remove. Therefore to avoid the emerge of double effect, the curriculum draft 2001 which still testing, need to review.

Kata Kunci: curriculum, competence, basic and intermediate education

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan

Mochamad Enoh adalah dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang warga negara mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UUSPN, 1989). Jadi jelas bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya membekali kepandaian belaka, dalam arti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus memilik keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Imtaq), sehingga tidak terjebak kepada sifat duniawi dan kebendaan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut maka kurikulum disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan disesuaikan dengan lingkungan; kebutuhan pembangunan nasional; perkembangan ilmu pengetahuan, teknonologi, dan kesenian; serta sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Perubahan kurikulum harus disesuaikan dengan asas-asas yang mendasari kurikulum tersebut, yaitu: (a) asas filosofis, (b) asas psikologis, (c) asas sosiologis, (d) asas organisatoris (Nasution, 2001: 11).

Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa dalam mata pelajaran geografi berarti sasaran didik harus mengetahui wilayah negaranya; memahami, mencintai dan menyayangi negaranya beserta segenap potensi yang dimiliki negara Indonesia, baik potensi sumberdaya alamnya, maupun potensi keanekaragaman budaya bangsanya. Mata pelajaran geografi berusaha menanamkan pemahaman-pemahaman tersebut, sehingga sasaran didik memiliki wawasan yang luas. Dengan demikian mata pelajaran geografi sebenarnya sudah menanamkan apa yang disebut 4 pilar pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Donoseputro (2002:2-4) yaitu to learn to know, to learn to do, to learn to live together, to learn to be.

PERBANDINGAN KURIKULUM GEOGRAFI 1994 DENGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 39 UUSPN 1989 disebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran; (a) pendidikan Pancasila; (b) pendidikan agama; (c) pendidikan kewarganegaraan; (d) bahasa Indonesia; (e) membaca dan menulis; (f) matematika (termasuk berhitung); (g) pengantar sains dan teknologi; (h) ilmu bumi; (i) sejarah nasional dan sejarah umum; (j) kerajinan tangan dan kesenian; (k) pendidikan jasmani dan kesehatan; (l) menggambar; dan (m) bahasa Inggris.

Pada pasal 39 itu pelajaran **geografi** disebut **ilmu bumi.** Penulis tidak mempermasalahkan istilah geografi atau ilmu bumi, namun yang jelas selama ini setiap jenjang pendidikan baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah umum, mata pelajaran Geografi tetap eksis, walaupun porsi jamnya tergolong sedikit.

Kurikulum geografi yang diperbandingkan adalah kurikulum 1994 dalam versi suplemen GBPP 1999, dan draf kurikulum berbasis kompetensi yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum pada tahun 2001. Secara umum, terdapat perbedaan menyolok di antara keduanya, baik di sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah umum.

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum geografi 1994 berstruktur jelas, yakni termasuk dalam Ilmu Pengetahuan Sosial bersama ekonomi dan sejarah. Setiap kelas mempunyai porsi 2 jam perminggu. Sedangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi, struktur mata pelajaran geografi tidak ada, namun geografi dimasukkan dalam sains. Alokasi waktu pelajaran geografi pada kurikulum 1994 adalah 42 jam. Sedangkan alokasi waktu pada kurikulum berbasis kompetensi adalah 34 jam.

Perbedaan yang lain adalah pelajaran IPS terdiri dari ekonomi, sejarah, dan geografi. Sedangkan pada kurikulum berbasis kompetensi, geografi, fisika, biologi, dan kimia, tergolong mata pelajaran sains dengan alokasi waktu 6 jam perminggu.

Di samping itu, geografi sosial masuk ke dalam mata pelajaran ilmu sosial, bersama-sama dengan ekonomi, dengan alokasi waktu masing-masing 3 jam perminggu. Mata pelajaran sains dan mata pelajaran ilmu sosial disajikan secara tematik.

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah Umum

Pada struktur program kurikulum 1994 geografi termasuk pelajaran IPS dengan alokasi waktu yang berdiri sendiri, dan tergolong pelajaran umum. Kurikulum 1994 masih seperti kurikulum 1984/1985 menggunakan pendekatan pembelajaran CBSA dan keterampilan proses dengan sistem Cawu. Kelemahan mata pelajaran geografi pada kurikulum 1994 adalah: (a) terlalu sarat materi; (b) materi kurang terfokus pada fenomena atau gejala permukaan bumi yang nyata terkait dengan wilayah dan kebutuhan hidup anak dan masyarakat; (c) pendekatan pembelajaran dan materi pelajaran belum sepenuhnya dipahami oleh para penulis buku dan guru, sehingga materi lebih banyak berupa fakta, kurang dijumpai kasus dan pemecahan masalah; (d) kondisi tersebut di atas menyebabkan masyarakat memandang buku geografi memuat materi lengkap dan tidak bergradasi antara buku SD, SLTP, dan SMU.

Pada kurikulum berbasis kompetensi struktur program geografi tidak jelas, walaupun substansinya ada, tetapi tidak dengan label yang eksplisit. Substansi geografi untuk program ilmu alam masuk di fisika. Sedangkan untuk program ilmu sosial substansinya masuk di ekonomi dengan alokasi waktu yang tidak jelas berapa jam perminggunya.

TANGGAPAN TERHADAP KURIKULUM 1994 DAN DRAF KURIKURLUM BERBASIS KOMPETENSI

Alokasi geografi di sekolah menengah pertama pada kurikulum 1994 sudah cukup memadai, yaitu mulai kelas I, II, dan III. Masing-masing kelas mendapat porsi 2 jam tatap muka, ekuivalen dua kali 45 menit perminggu, geografi tergolong dalam kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang terdiri dari ekonomi, geografi, dan sejarah. Di dalam proses belajar-mengajar, pemberian materi ini disampaikan oleh guru masingmasing bidang studi, namun nilai akhir merupakan gabungan dari ketiga mata pelajaran tersebut. Hal ini merupakan penyimpangan dari konsep IPS itu sendiri yang seharusnya merupakan team teaching, bukan team teacher. Hasil evaluasi tahap akhir maupun evaluasi tahap akhir nasional (Ebtanas) menunjukkan nilai IPS banyak yang jatuh. Hal ini disebabkan jatuhnya nilai mata pelajaran geografi. Jadi mata pelajaran geografi dianggap menjadi biang keroknya.

Struktur program pengajaran di sekolah menengah umum menunjukkan mata pelajaran geografi hanya diberikan di kelas I dan II saja dan porsinya hanya cukup 2 jam saja perminggu. Sedangkan di kelas III, pada program Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa, mata pelajaran geografi ditiadakan.

Rendahnya nilai mata pelajaran geografi di SLTP dan SMU disebabkan berkembangnya anggapan bahwa mata pelajaran geografi tidak menarik dan membosankan. Permasalahannya terletak pada pengampu mata pelajaran geografi, yakni penguasaan mereka terhadap penguasaan materi, metode, dan media pembelajaran geografi yang rendah. Guru pengampu mata pelajaran geografi pada umumnya bukan lulusan pendidikan geografi. Hasil pengabdian kepada masyarakat Jurusan Geografi IKIP Surabaya (1998) menunjukkan bahwa di kabupaten Lamongan Jawa Timur, 45% guru yang mengajar mata pelajaran geografi bukan lulusan pendidikan geografi. Mereka merupakan lulusan pendidikan ekonomi, PPKn, atau IAIN. Pada saat penulis mendapat tugas dari Direktorat SLTP Depdiknas bulan Nopember 2001 di Kendari, lebih 50% guru yang mengampu mata pelajaran geografi bukan lulusan pendidikan geografi.

Di samping itu anak didik sekarang mengalami pergeseran nilai. Mata pelajaran tertentu dianggap penting karena dievaluasi secara nasional (Ebtanas). Mata pelajaran geografi pada kurikulum 1975 pernah masuk dalam Ebtanas, bergabung dengan mata pelajaran ekonomi dan sejarah. Pada kurikulum 1994 mata pelajaran geografi di Sekolah menengah Umum tidak termasuk mata pelajaran Ebtanas. Kondisi ini merupakan salah satu faktor penyebab para siswa kurang berminat terhadap mata pelajaran geografi. Dengan demikian, mata pelajaran geografi baik di Sekolah Menengah Pertama maupun di Sekolah Menengah Umum seakan-akan disepelekan.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi pelajaran geografi digabungkan dalam mata pelajaran fisika, dan disajikan secara tematik, dengan jumlah alokasi waktu keseluruhan 5 jam. Pada program ilmu sosial terpadu, terdapat unsur-unsur ekonomi dan geografi sosial dengan alokasi waktu 2 jam perminggu. Selanjutnya dalam struktur program ilmu sosial ada mata pelajaran sains terpadu dengan alokasi waktu 2 jam perminggu, namun hanya meliputi fisika, kimia, dan biologi, sedangkan geografi tidak ada. Struktur program bahasa terdapat mata pelajaran sains terpadu dengan alokasi waktu 2 jam meliputi mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, sedangkan geografi tidak ada. Hal ini tidak adil. Mengapa geografi ditiadakan?

IMPLIKASI

Memperhatikan kenyataan di lapangan tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa kurikulum berbasis kompetensi sudah diujicobakan, khususnya di beberapa sekolah di Jawa Timur, maka penulis perlu menanggapi situasi yang sedang terjadi. Bilamana ujicoba kurikulum tersebut berlanjut sampai kepada harus dilaksanakannya, maka implikasinya sebagai berikut.

Secara aksiologi ilmu geografi dianggap tidak berguna bagi pembangunan nasional, padahal di negara-negara maju ilmu geografi sangat diperlukan. Bahkan mata pelajaran geografi disajikan secara khusus untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan geografi, terutama untuk menghadapi pengalaman hidup sehari-hari dalam masyarakat (Unwin, 1992:15).

Penerbitan draf kurikulum berbasis kompetensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan para dosen, guru, geografi dan mahasiswa calon guru geografi. Penggabungan mata pelajaran geografi ke dalam mata pelajaran sains dan ilmu sosial, merupakan awal dari penggusuran yang lambat laun akan dihapuskannya mata pelajaran geografi, sehingga eksistensi mata pelajaran geografi akhirnya hilang sama sekali.

Kekhawatiran akan hapusnya mata pelajaran geografi di SMU ini bukan tidak beralasan, karena dengan penggabungan geografi yang masuk ke dalam sains yang terdiri dari materi fisika, biologi, kimia, dan disajikan secara tematik, maka akan mengaburkan geografi sebagai suatu bidang ilmu yang bersifat unified. Demikian pula jika geografi digabungkan dengan materi pelajaran ekonomi. Dampaknya adalah guru geografi akan lebih diremehkan oleh para siswa.

Efek ganda yang akan terjadi, adalah para lulusan dari SLTP, maupun SMU tidak akan mengenal wilayah negaranya sendiri dan wilayah negara lain. Hal ini sangat merugikan bangsa dan negara di masa yang akan datang lebih-lebih dalam era global ini. Wawasan Nusantara tidak akan dikenal dan tidak berarti bagi generasi mendatang; rasa cinta terhadap tanah air dan rasa memiliki negara Kesatuan Republik Indonesia akan luntur, rasa nasionalisme dan patriotisme generasi mendatang akan luntur; generasi mendatang tidak akan mengenal potensi sumberdaya alam yang dimiliki negaranya; hubungan antar wilayah dan antar negara tidak akan memperoleh perhatian yang optimal; dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa menjadi terpecah-pecah.

Pendidikan guru geografi menjadi mubazir. Hal ini berarti tidak mendidik bangsa untuk mempersiapkan masa depan. Nasib ribuan guru geografi dan eksistensinya hilang. Terjadi pengangguran tersembunyi, karena guruguru negeri tidak memiliki job. Hal ini berarti suatu kerugian bagi negara, karena harus menggaji guru tersebut. Demikian juga, bagaimana nasib ribuan calon-calon guru geografi yang sedang duduk di bangku kuliah dewasa ini?

PERANAN AKSIOLOGIS ILMU GEOGRAFI

Hasil pertemuan Ikatan Geografi Indonesia (IGI) di Yogyakarta 13 Oktober 2001 di Wisma LPP, dilanjutkan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IGI di Malang 23-24 Oktober 2001, Pertemuan Staf Pengajar Geografi dengan IGI di Jakarta tanggal 29-31 Oktober 2001, menyatakan bahwa pelajaran geografi dan ilmu geografi mempunyai peranan dan kegunaan yang besar bagi pembangunan bangsa dan negara dengan argumentasi: (1) geografi mempelajari wilayah secara utuh-menyeluruh tentang sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga mempunyai peran penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka otonomi daerah; (2) geografi mempelajari proses perubahan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial ekonomi, sehingga geografi memberi bekal untuk tanggap terhadap isu global dan perubahan global; (3) rasa cinta tanah air dapat terbina dari mata pelajaran geografi, karena dengan mengenal wilayah negaranya maka akan menyayanginya dan timbul rasa nasionalisme; (4) mata pelajaran geografi dapat memperteguh wawasan nusantara, sehingga memperkuat ketahanan nasional dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa; (5) geografi memberikan bekal yang memadai untuk menjaga sumberdaya alam dan lingkungannya agar tidak mengalami kerusakan dan degradasi lingkungan; (6) geografi memahami keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dan negara-negara lain, sehingga memiliki wawasan yang luas terhadap hubungan kerja sama baik lokal, nasional, regional, maupun internasional; (7) mata pelajaran geografi di SMU memberi bekal kepada lulusannya yang meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi, misalnya: fakultas/jurusan geologi, geodesi, geografi, pertanian, kehutanan, dan pertambangan; (8) dalam tes masuk ke perguruan tinggi, soal-soal geografi selalu muncul sejumlah 25-30%; (9) tata ruang dan perencanaan wilayah selalu didasarkan pada data spasial sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, yang menjadi kajian dalam geografi; (10) mata pelajaran geografi di negara-negara maju (Amerika) menjadi mata pelajaran inti dari SD sampai perguruan tinggi; dan (11) ilmu geografi dewasa ini mengalami perkembangan pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengideraan jauh dan GIS.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa draf kurikulum berbasis kompetensi dapat menimbulkan keresahan bagi para pakar pendidikan geografi, geograf, para guru di SLTP dan SMU. Bilamana hal tersebut terus dilaksanakan akan menimbulkan efek ganda. Penulis menyarankan kepada Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, agar draf kurikulum berbasis kompetensi tahun 2001 ditinjau kembali dengan sunguh-sungguh, khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran geografi.

Struktur program kurikulum untuk sekolah menengan pertama dan sekolah menengah umum disarankan untuk dirubah sebagai berikut. Pertama, mata pelajaran geografi seyogyanya harus ada tersendiri tidak digabung dengan sains yang lain, baik di Sekolah Menengah Pertama, maupun di Sekolah Menengah Umum. Kedua, distribusi jam pelajaran geografi harus diberikan mulai kelas I, II, dan III. Ketiga, mata pelajaran geografi harus tetap mendapat porsi sesuai dengan jurusan yang ada dalam perubahan kurikulum tersebut.

Pada masing-masing program, geografi harus diberikan dengan penekanan yang berbeda. Misalnya untuk program ilmu alam, diberikan ilmu bumi alam, dan untuk program ilmu sosial dan bahasa diberikan ilmu bumi sosial ekonomi. Struktur program kurikulum sekolah menengah pertama diusulkan untuk memuat mata pelajaran geografi yang berdiri sendiri dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran pada kelas I, II, dan III.

DAFTAR RUJUKAN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1989. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya. Jakarta: Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kebijaksanaan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah. Pusat Kurikulum (Draf). Jakarta: Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional. 1994. Kurikulum SMP dan SMU. Suplemen 1999. Jakarta: Depdiknas.

Donosepoetro, M. 2002. Pendidikan Menyongsong Globalisasi. Makalah disampaikan dalam seminar nasional, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Tanggal 13 Mei 2002.

Nasution, S. 2001. Asas-asas Kurikulum. Jakarta. PT. Bumi Aksara

24 JURNAL ILMU PENDIDIKAN, FEBRUARI 2003, JILID 10, NOMOR 1

Jurusan Geografi IKIP Surabaya. 1998. *Pelatihan Proses Belajar Mengajar IPS (Geografi) pada Guru-Guru SLTP di Kabupaten Lamongan*. Surabaya: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Surabaya.

Unwin, T. 1992. The Plaxce of Geography. New York: John Willey & Sons.Inc.